

ANALISIS KEBIJAKAN POPULIS DAN PETA MUTU PENDIDIKAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Gustin

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
gustinmandary@gmail.com

Abstract

The government continues to improve the education sector with various steps, one of which is by making regular curriculum improvements, such as the change from the level of education to the 2013 curriculum. Changes in the curriculum to 2013 curriculum, among others, to meet the golden generation of Indonesia. If changes are made, it is hoped that the young generation in the future will be able to realize the ideals of Indonesian education. with the low quality of education of the population, it will also affect the low competitiveness of the workforce of the Bangka Belitung Islands Province in the labor market both the labor market in this area itself and the labor market outside the region. Related to the education quality map in the province of Kep. Bangka Belitung as Strengthening HR to be able to oversee the implementation of PMP is still very much needed, especially for the development of the capacity of local facilitators to improve the quality of the learning process. Mapping the quality of education must be maintained in order to improve the quality of schools from time to time.

Keywords: *Populist, Quality, Education*

Abstrak

Pemerintah secara terus-menerus membenahi sektor pendidikan dengan berbagai langkah, salah satunya adalah dengan melakukan perbaikan kurikulum secara berkala, seperti perubahan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan menjadi kurikulum 2013. Perubahan kurikulum menjadi kurikulum 2013, antara lain dimaksudkan untuk menyongsong generasi emas Indonesia. Jika perubahan kurikulum ini dilakukan, maka diharapkan generasi muda di masa depan akan dapat mewujudkan cita-cita pendidikan bangsa Indonesia. dengan kualitas pendidikan penduduk yang rendah, akan menyebabkan juga rendahnya daya saing tenaga kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pasar kerja baik pasar kerja di daerah ini sendiri maupun pasar kerja di luar daerah. Terkait Peta Mutu pendidikan di Provinsi Kep. Bangka Belitung bahwa Penguatan SDM untuk dapat mengawal implementasi PMP masih sangat dibutuhkan, terutama untuk pengembangan kemampuan fasilitator daerah untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan harus dijaga kontinuitasnya sehingga dapat dipelajari perubahan mutu sekolah dari waktu ke waktu.

Kata kunci: *Populis, Mutu, Pendidikan.*

I. PENDAHULUAN

Hakikat pembangunan Indonesia yang hilirisasinya pada pembangunan manusia seutuhnya merupakan konsep suatu arah pembangunan populis. Meski telah diterapkan dalam perencanaan pembangunan Indonesia yang sistematis dan terarah sejak Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) I tahun 1986 dengan tatanan kebijaksanaan yang secara sungguh-sungguh mengembangkan konsep pembangunan berwawasan berkelanjutan, namun pemerintah belum dapat secara maksimal merealisasikan dan mengintegrasikan kebijakan yang ideal.

Menurut Rogers dalam Zulkarimen Nasution pembangunan adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya kebenaran, keadilan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.¹

Pemerintah secara terus-menerus membenahi sektor pendidikan dengan berbagai langkah, salah satunya adalah dengan melakukan perbaikan kurikulum secara berkala, seperti perubahan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan menjadi kurikulum 2013. Perubahan kurikulum menjadi kurikulum 2013, antara lain dimaksudkan untuk menyongsong generasi emas Indonesia. Jika perubahan kurikulum ini dilakukan, maka diharapkan generasi muda di masa depan akan dapat mewujudkan cita-cita pendidikan bangsa Indonesia.

Pendidikan adalah salah satu cara dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia baik generasi muda sekarang maupun di masa depan. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan kebutuhan manusia untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan potensinya yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Sesuai dengan Lampiran Permendikbud No. 64 Tahun 2013 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah, diharapkan pendidikan di Indonesia

¹ Zulkarimen Nasution, *Komunikasi Pembangunan: Pengenala Teori Dan Penerapannya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), p. 28.

dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golongannya.

Dalam upaya mencapai tujuan kurikuler program pendidikan suatu lembaga pendidikan, maka perlu dirumuskan tujuan umum pembelajaran maupun tujuan khusus pembelajaran. Apabila tujuan pembelajaran suatu program atau bidang pelajaran itu ditinjau dari hasil belajar, maka akan muncul tiga ranah atau aspek, yaitu ranah *kognitif*, *afektif*, dan *psikomotorik*.

Adapun tujuan pembelajaran pada ranah *kognitif*, *afektif*, dan *psikomotorik* dapat dikategorikan sebagai berikut: pertama, ranah *kognitif* meliputi kemampuan *kognitif* tingkat pengetahuan, kemampuan *kognitif* tingkat pemahaman, kemampuan *kognitif* tingkat penerapan, kemampuan *kognitif* tingkat analisis, kemampuan *kognitif* tingkat sintesis, dan kemampuan *kognitif* tingkat evaluasi. Kedua, ranah *afektif* meliputi pengenalan, pemberian respons, penghargaan terhadap nilai, pengorganisasian, dan pemeranan. Ketiga, ranah *psikomotorik*, meliputi peniruan, manipulasi, ketetapan gerakan, artikulasi, dan naturalisasi (Hosnan, 2014: 10-12).

Pemerintah harus melakukan perubahan mendasar terhadap strategi pembangunannya. Strategi yang diambil hendaknya memperhatikan potensi serta kondisi sumber daya penduduk yang merupakan objek sekaligus subjek dari pembangunan itu sendiri. Dalam hal ini sumber daya penduduk dilihat dari segi kuantitas dan kualitas. Oleh karenanya diperlukan suatu strategi pembangunan yang mengedepankan pembangunan berwawasan kependudukan sehingga dicapai pembangunan yang berkelanjutan. Perubahan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan utama pembangunan berkelanjutan dengan beberapa cara diantaranya penguatan kebijakan populis dan pemetaan potensi

pendidikan khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara komprehensif.

Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2017 tentang statistik kesejahteraan rakyat dalam bidang pendidikan menunjukkan bahwa persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berumur 7-24 Tahun di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Status Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu jumlah yang masih sekolah adalah 68,33% dan jumlah orang yang tidak bersekolah lagi adalah 31,36%. Di Daerah Perdesaan Dalam data menunjukkan 65,46% jumlah yang masih sekolah dan 33,90% jumlah orang yang tidak bersekolah lagi (BPS, 2017). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Persentase Status Pendidikan Bagi Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berumur 7-24 Tahun di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Status Pendidikan	Persentase Masih Sekolah	Persentase Tidak Bersekolah Lagi
Status Pendidikan Daerah Perkotaan	66,33%	31,36%
Status Pendidikan Daerah Perdesaan	65,46%	33,90%

Dari: BPS 2017 tentang Statistik Kesejahteraan Rakyat

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki persentase terendah dalam hal jumlah yang masih sekolah. Sehingga berdasarkan data tersebut perlu ditindak lanjuti secara serius agar tujuan pembangunan berwawasan kependudukan dapat menunjukkan hasil yang maksimal.

Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi selain sumber daya alam, modal, entrepreneur untuk menghasilkan output. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka semakin meningkat pula efisiensi dan produktivitas suatu negara. Sejarah mencatat bahwa negara yang menerapkan paradigma pembangunan berdimensi manusia telah mampu berkembang meskipun tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Penekanan pada investasi manusia diyakini merupakan basis dalam

meningkatkan produktivitas faktor produksi secara total. Tanah, tenaga kerja, modal fisik bisa saja mengalami diminishing return, namun ilmu pengetahuan tidak.

Kebijakan populis memberi pesan bahwa pembangunan harus disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Dalam hal ini yang menjadi titik pusat dalam proses pembangunan adalah Penduduk. Penduduk merupakan objek sekaligus subjek dalam pembangunan, karena itu pembangunan haruslah dari penduduk, oleh penduduk dan untuk penduduk. Selain itu pembangunan berwawasan kependudukan juga merupakan pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan sumber daya manusia mengandung arti bahwa dalam pembangunan yang ditekankan harus lebih kepada peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibandingkan dengan pembangunan infastruktur semata. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimaksud dalam hal ini tidak lain adalah peningkatan kualitas penduduk.

Kebijakan populis oleh Richard Hofstadter dalam Allen dan Woodmen , yaitu kebijakan bersifat membangun program-program yang tujuan utamanya membangun masyarakat.²

Provinsi Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi baru di Indonesia tentu saja sedang giat-giatnya melakukan pembangunan. Prioritas pembangunan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang harus disusun secara tepat. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah berkenaan dengan sumber daya penduduk baik kuantitas maupun kualitasnya. Bahwa sumber daya penduduk menjadi acuan dalam proses pembangunan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung benar-benar beorientasi penduduk. Pembangunan yang menerapkan strategi pembangunan berwawasan kependudukan dalam rangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Bangka Belitung.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa kondisi dan potensi penduduk menjadi aspek penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Sehubungan dengan itu dipandang perlu dilakukan penelitian untuk mengungkap

² Allen F Davis dan Harold D Woodman (ed). *Konflik dan Konsensus*. (Jogjakarta, UGM Press, 1991), hlm. 132

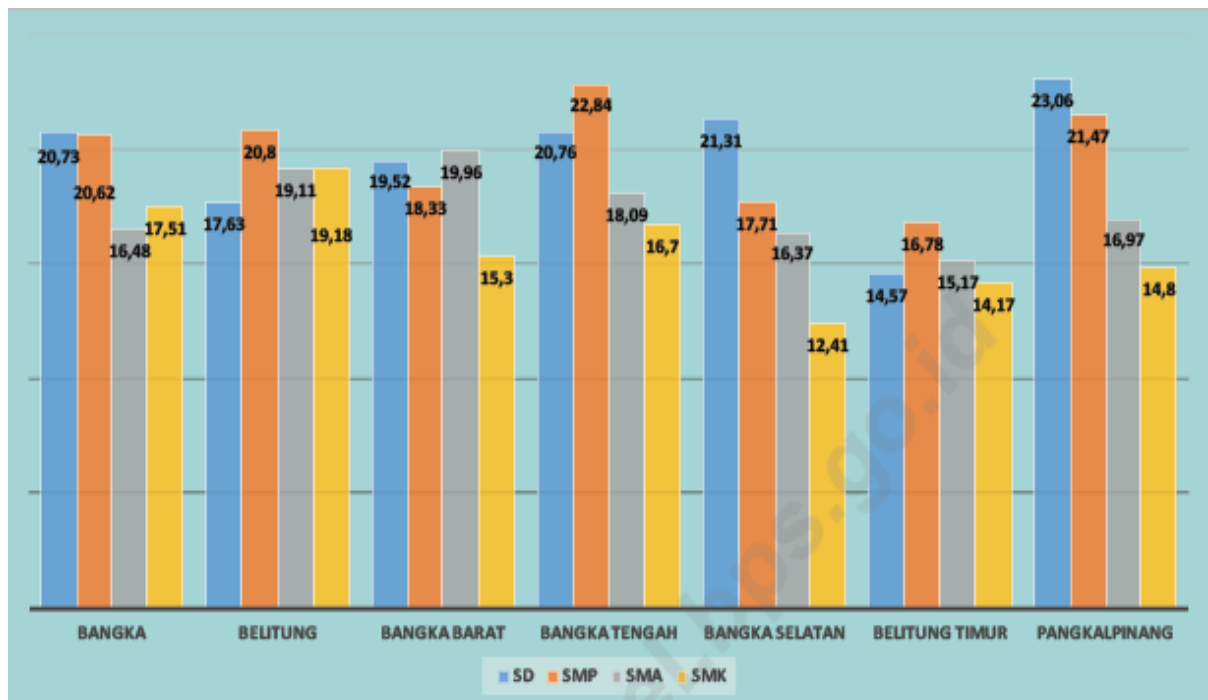
berbagai informasi berkenaan dengan sumber daya penduduk baik kuantitas maupun kualitas di Provinsi Bangka Belitung. Informasi-informasi tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai acuan pembangunan di Provinsi Bangka Belitung.

II. PEMBAHASAN

A. Analisis Kebijakan Populis Bidang Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

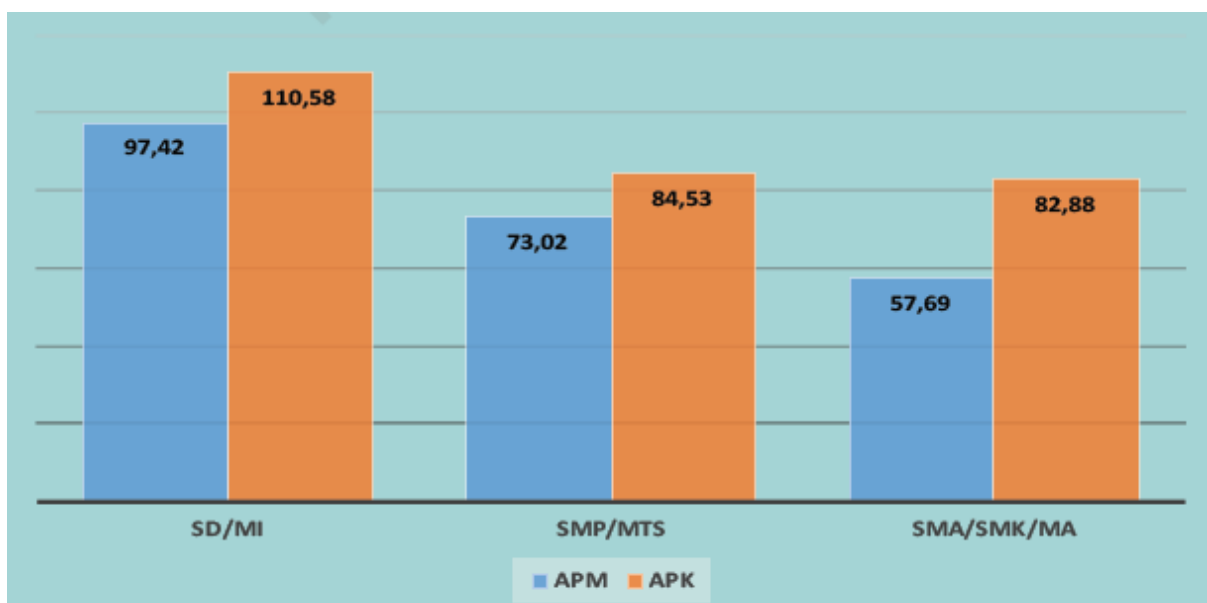
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia yaitu: umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak. Rasio murid sekolah dapat dipergunakan untuk melihat rata-rata muatan suatu sekolah menampung murid. Pada tahun ajaran 2016/2017, rasio murid SD terhadap jumlah sekolah sebesar 199,18, berarti SD di Kepulauan Bangka Belitung rata-rata menampung 199-200 murid. Rasio murid di sekolah di bawah Dinas Pendidikan masih relatif lebih banyak dibandingkan sekolah di bawah Kanwil Kementerian Agama.

Dalam konteks tersebut, peranan pendidikan Kependudukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kependudukan menjadi sangat penting dan strategis, karena isu dan permasalahan kependudukan bersifat universal dan memiliki spektrum yang sangat luas dalam tata kelola kehidupan umat manusia di muka bumi. Pendidikan Kependudukan telah menjadi isu dunia ditandai dengan adanya Deklarasi Kependudukan PBB tahun 1967, bahwa pemecahan masalah kependudukan harus dilakukan secara terencana, sistematis, dan komprehensif dalam jangka panjang dengan mengikutsertakan bidang dan sektor pembangunan terkait termasuk pendidikan.



Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

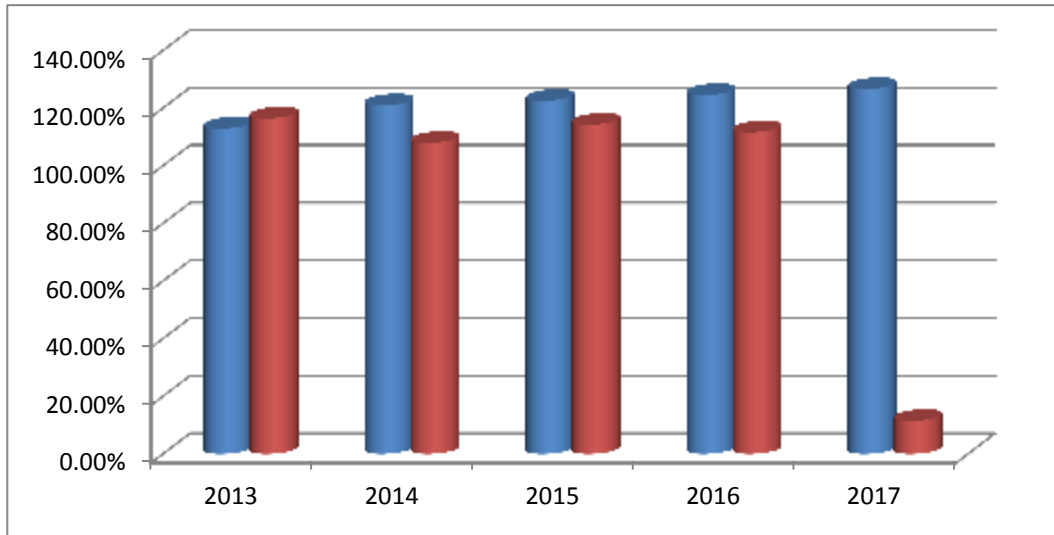
Gambar 4.1 Rasio Murid-Guru menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, 2017



Sumber: Survei Sosial Nasional, 2017

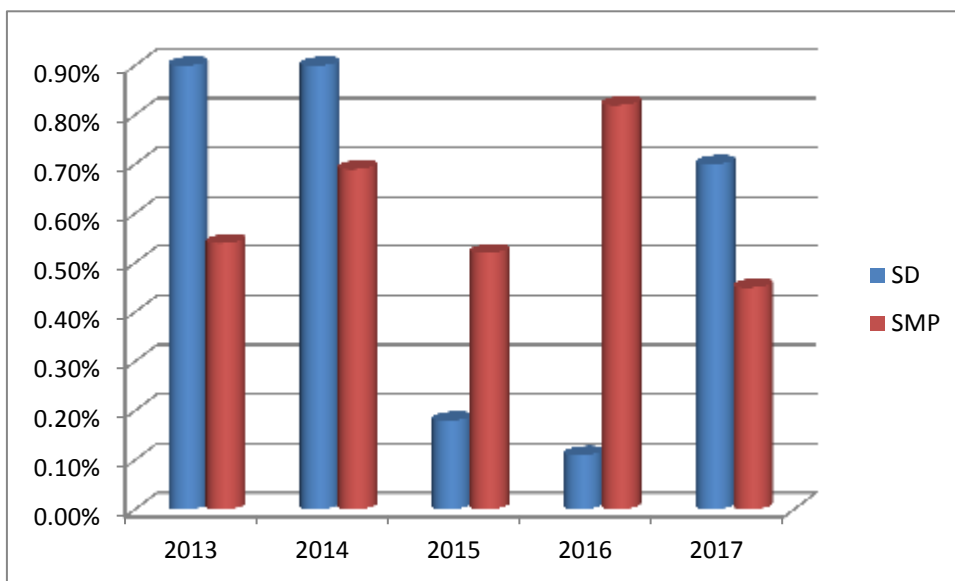
Gambar 4.2 Perbandingan Angka Partisipasi Murni dan Kasar Berdasarkan Jenjang Sekolah Tahun 2017

Data terkait pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara rinci dapat dilihat pada deskripsi berikut ini.



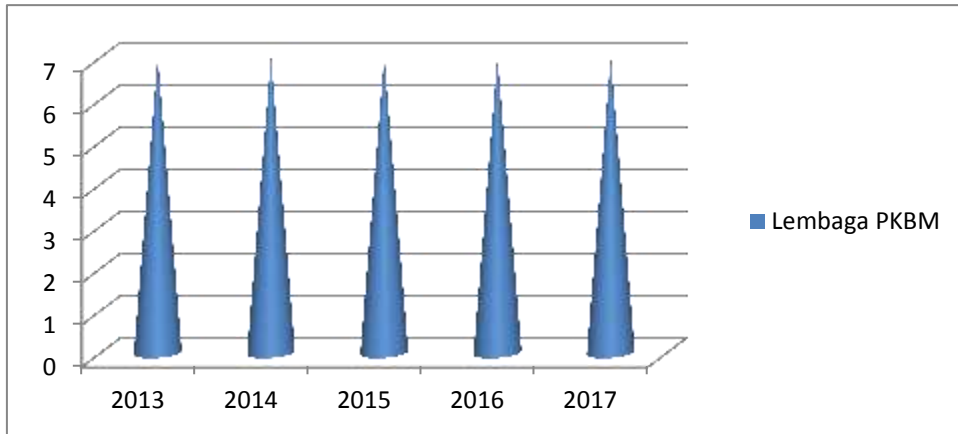
Gambar 4.3 Laporan peningkatan partisipasi anak pendidikan 3 tahun terakhir (SD/SMP) Kota Pangkalpinang

Berdasarkan laporan partisipasi anak SD tertinggi pada tahun 2017 dan terendah pada tahun 2013. Namun, untuk SMP tertinggi pada tahun 2013 dan terendah pada tahun 2017.



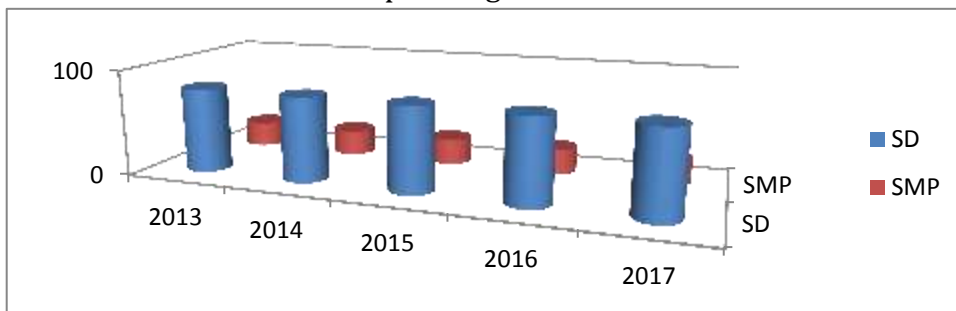
Gambar 4.4 Penurunan angka putus sekolah pendidikan (SD/SMP) Kota Pangkalpinang

Berdasarkan laporan penurunan angka putus sekolah SD tertinggi pada tahun 2014 dan terendah pada tahun 2016. Namun, untuk SMP tertinggi pada tahun 2013 dan terendah pada tahun 2017.

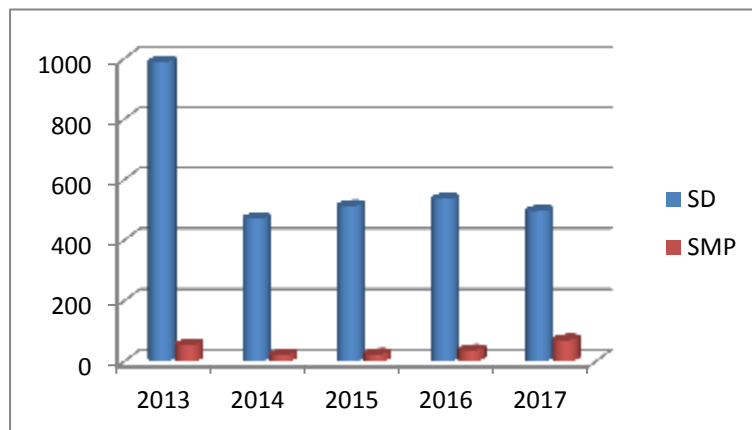


Gambar 4.5 Data jumlah PKBM siswa putus sekolah ke jenjang paket B dan C Kota Pangkalpinang

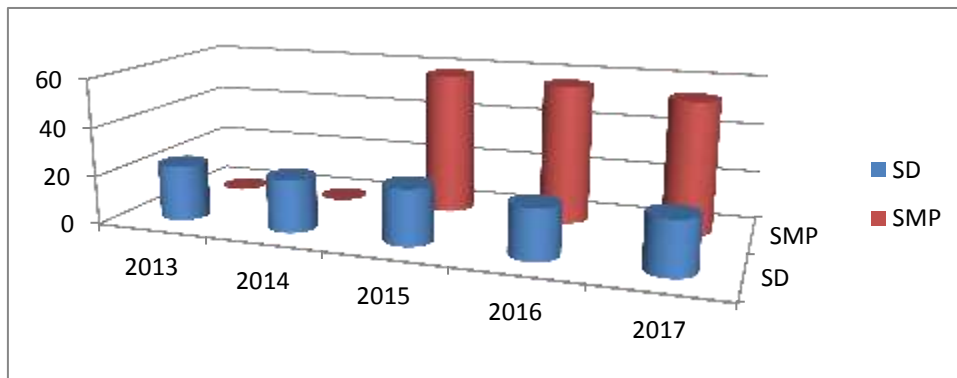
Berdasarkan laporan PKBM di Kota Pangkalpinang rata-rata 7 Lembaga PKBM dari tahun 2013 sampai dengan 2017.



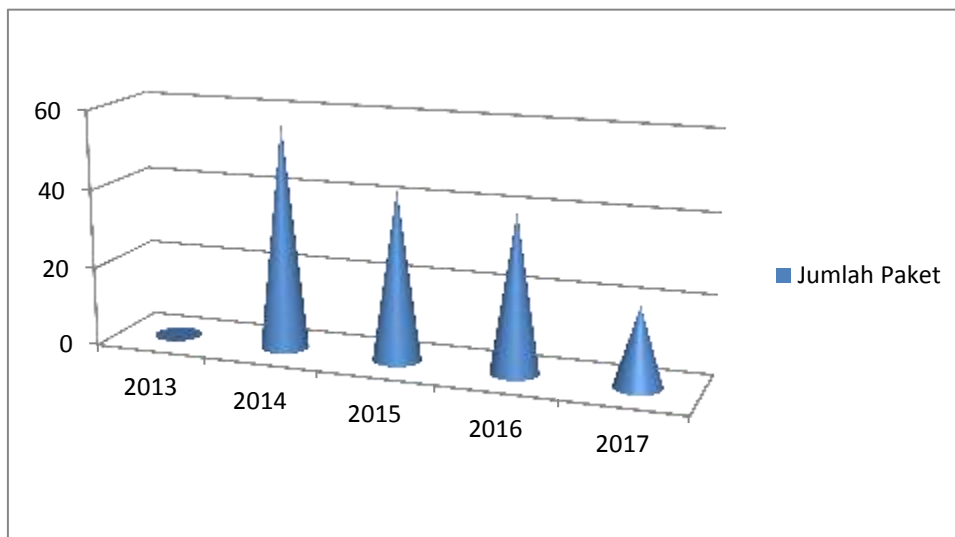
Gambar 4.6 Data tentang lembaga SD/SMP per kab. dan pertahun (5 tahun terakhir) Kota Pangkalpinang



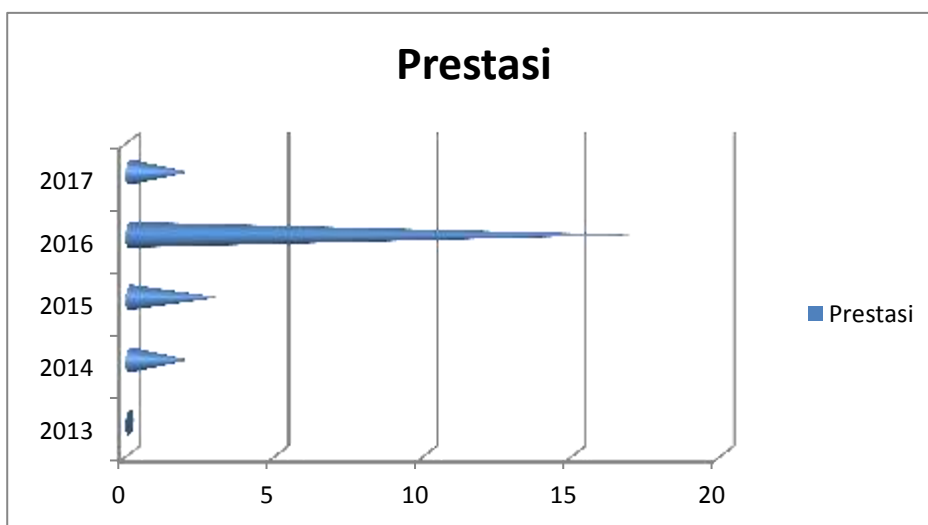
Gambar 4.7 Data angka putus sekolah dan siswa mengulang kelas (tidak naik kelas untuk semua jenjang)



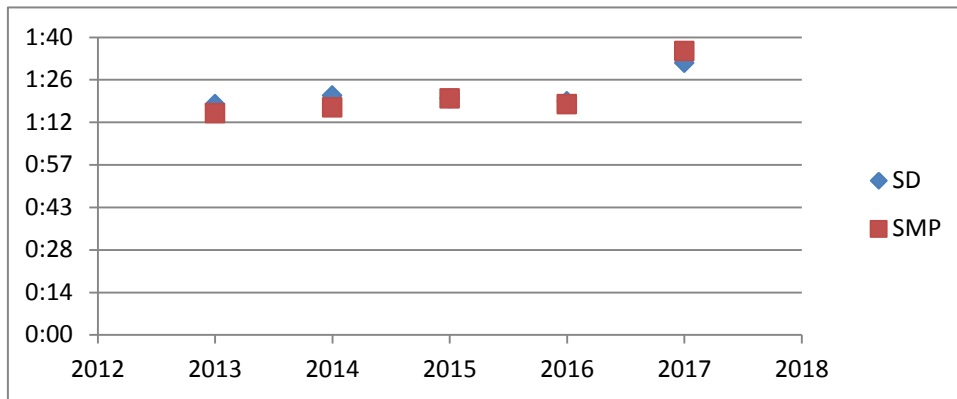
Gambar 4.8 Data nilai UN 3 tahun terakhir Kota Pangkalpinang



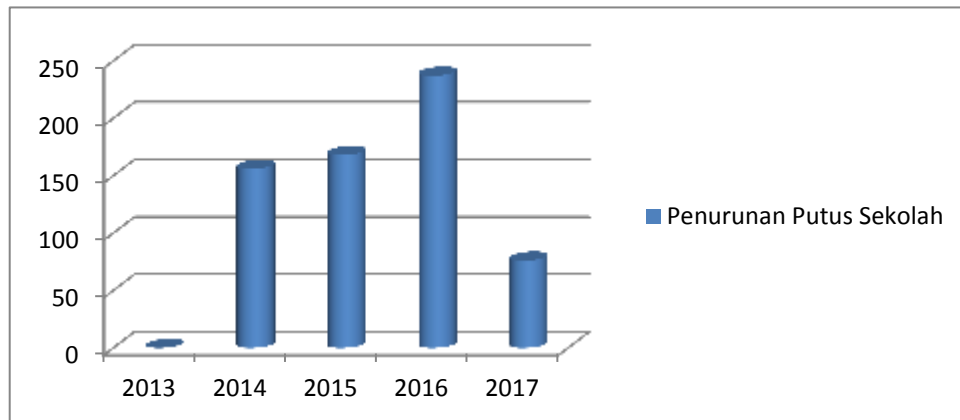
Gambar 4.9 Data tentang sarana dan prasarana Kota Pangkalpinang



Gambar 4.10 Data siswa berprestasi skala nasional dan internasional Kota Pangkalpinang

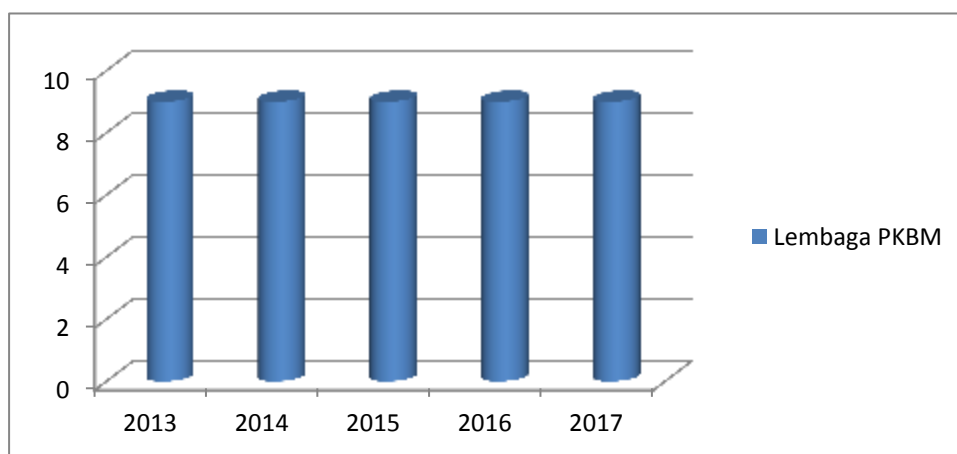


Gambar 4.11 Data rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan peserta didik (SD/SMP/SMA/SMK) 3 tahun terakhir Kota Pangkalpinang

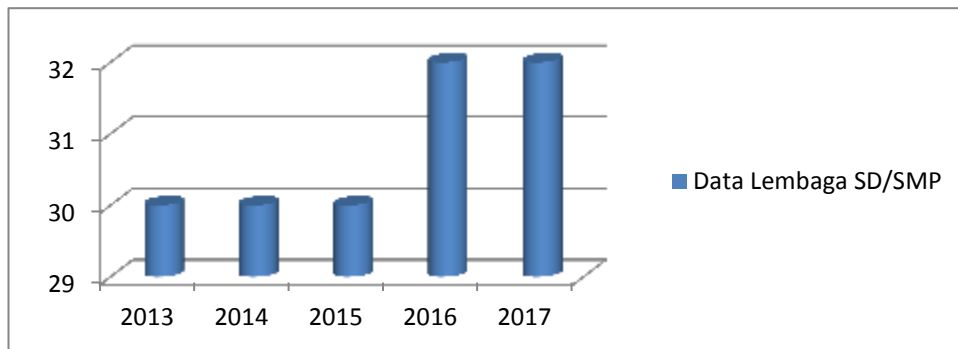


Gambar 4.12 Penurunan angka putus sekolah pendidikan (SD/SMP) Kab. Bangka Selatan

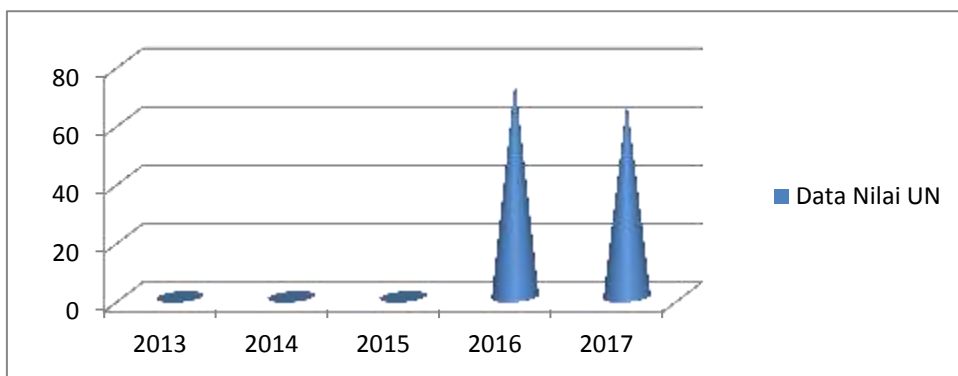
Berdasarkan data penurunan angka putus sekolah terendah pada tahun 2017 dan tertinggi tahun 2016.



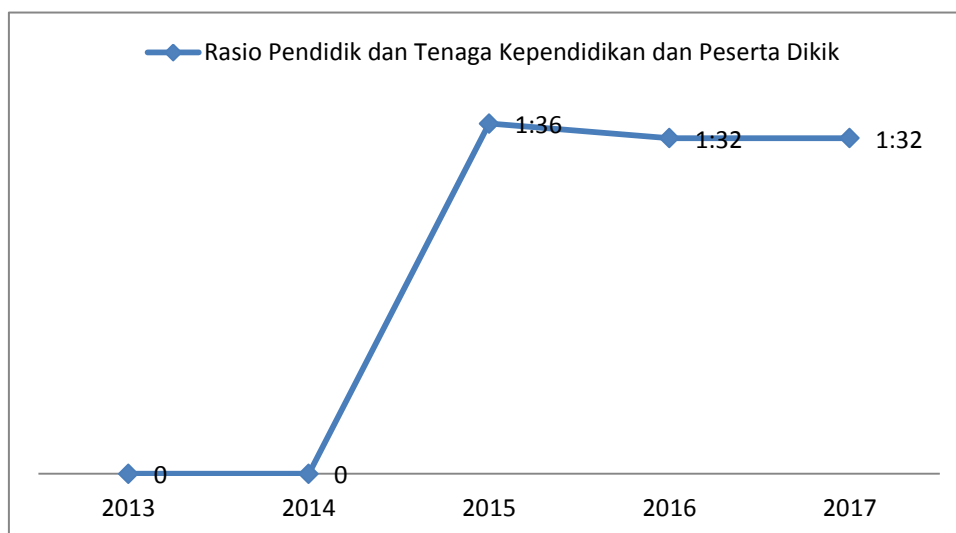
Gambar 4.13 Data jumlah PKBM siswa putus sekolah ke jenjang paket B dan C Kab. Bangka Selatan



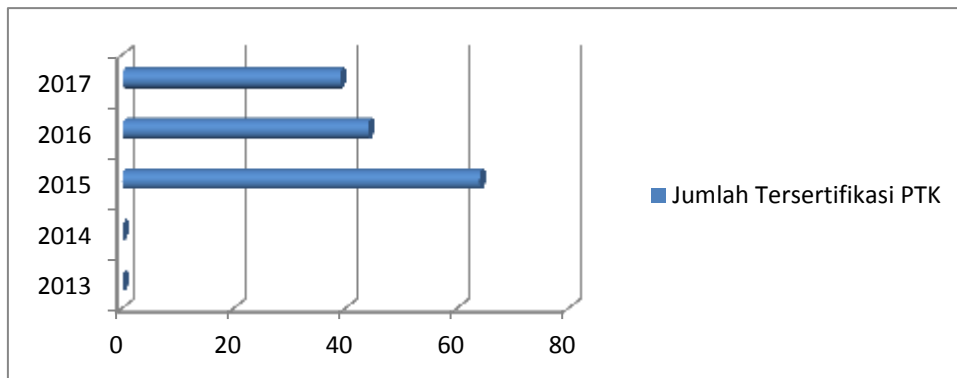
Gambar 4.14. Data tentang lembaga SD/SMP per kab. dan pertahun (5 tahun terakhir) Kab. Bangka Selatan



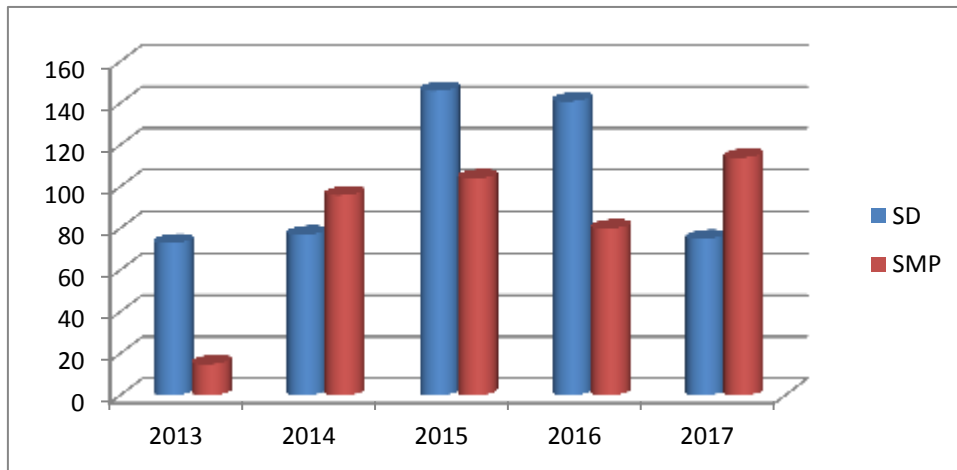
Gambar 4.15 Data nilai UN 3 tahun terakhir Kab. Bangka Selatan



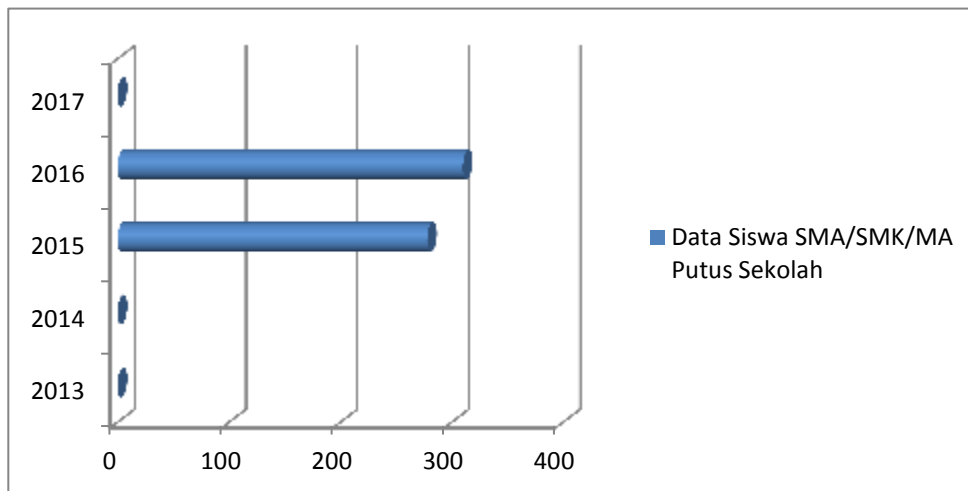
Gambar 4.16 Data rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan peserta didik Kab. Bangka Selatan



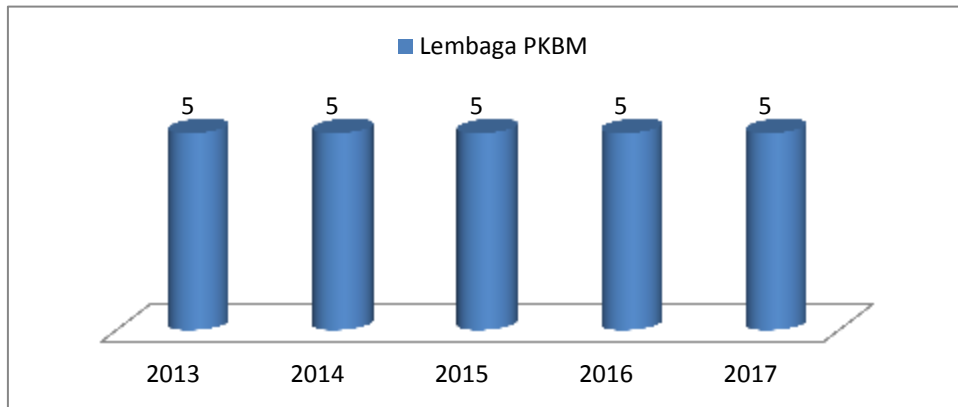
Gambar 4.17 Sertifikasi PTK Kab. Bangka Selatan



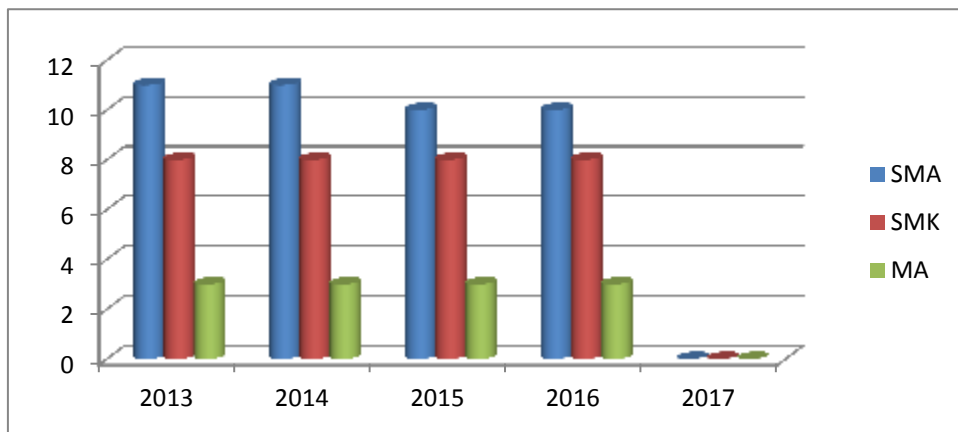
Gambar 4.18 Data Putus Sekolah SD dan SMP Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bangka Barat



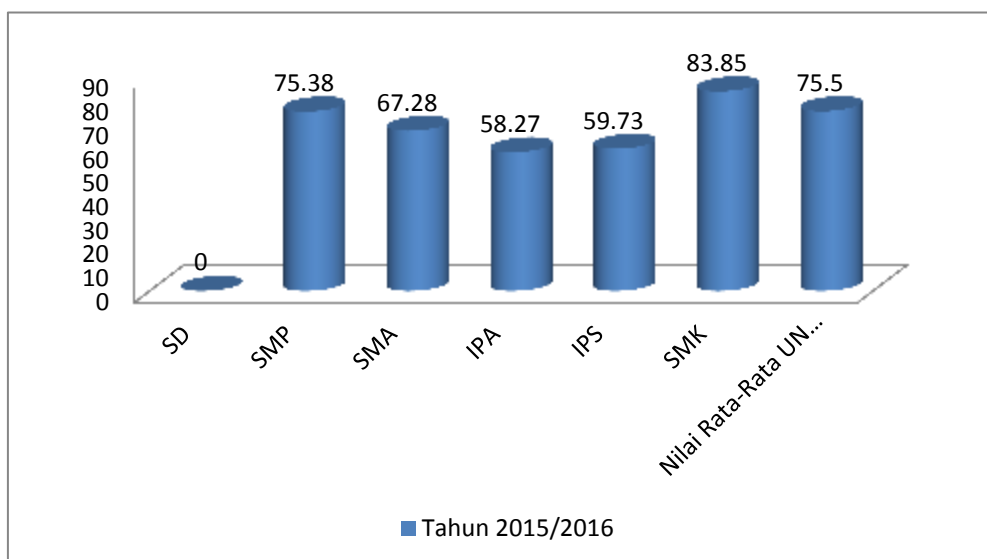
Gambar 4.19 Data Siswa SMA/SMK/MA Putus Sekolah Kabupaten Bangka Barat



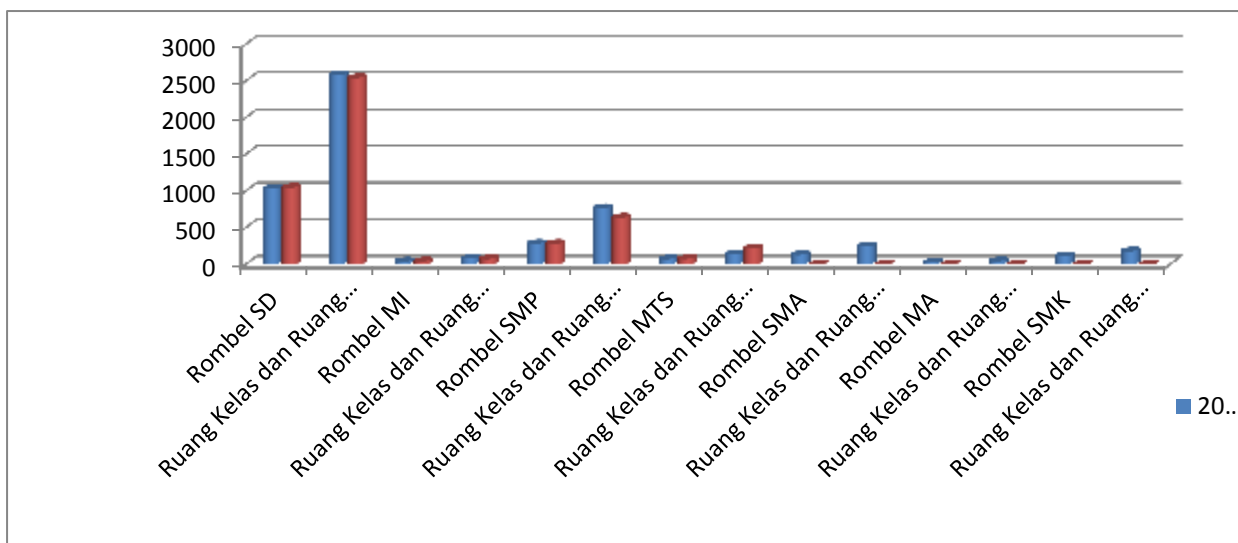
Gambar 4.20 Data Lembaga PKBM di Kabupaten Bangka Barat



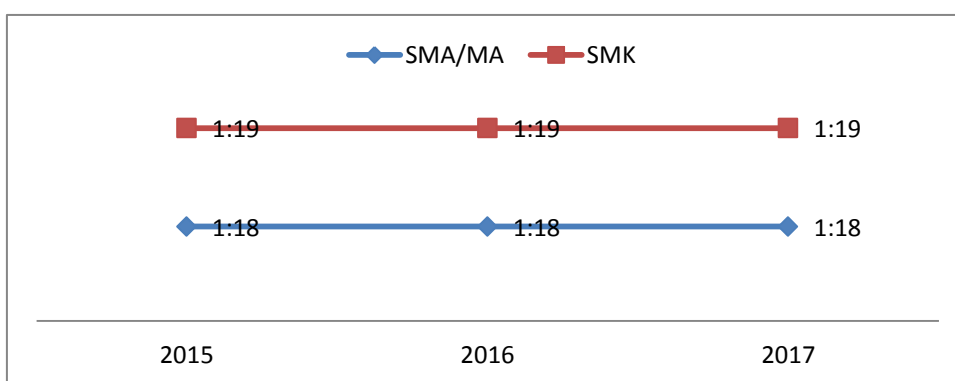
Gambar 4.21 Data tentang lembaga SMA/SMK/MA per kab. dan pertahun Kab. Bangka Barat



Gambar 4.22 Data Nilai UN Tahun 2015/2016 Kab. Bangka Barat



Gambar 4.23 Data Sarana dan Prasarana Pendidikan Kab. Bangka Barat



Gambar 4.24 Data Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik SMA/MA dan SMK Kab. Bangka Barat

Berdasarkan gambaran di atas masih perlu adanya rekonstruksi di bidang pendidikan sebab jika melihat persentase di tingkat SD memang setiap tahun mengalami peningkatan, namun masuk pada usia tingkat SMP dan seterusnya peningkatan partisipasi pendidikan kurangnya naik turun atau tidak stabil. Untuk perlu adanya pengintegrasian muatan materi pendidikan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai penguatan materi pembelajaran. Ini agar guru dan peserta didik dapat memahami isu kependudukan secara lebih luas dan guru mampu mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam pembelajaran sesuai kurikulum.

Materi kependudukan diintegrasikan dengan mata pelajaran sesuai dengan pokok bahasan sehingga bukan mata pelajaran baru, tidak menambah jam pelajaran, tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar namun justru mempertajam materi yang dibahas.

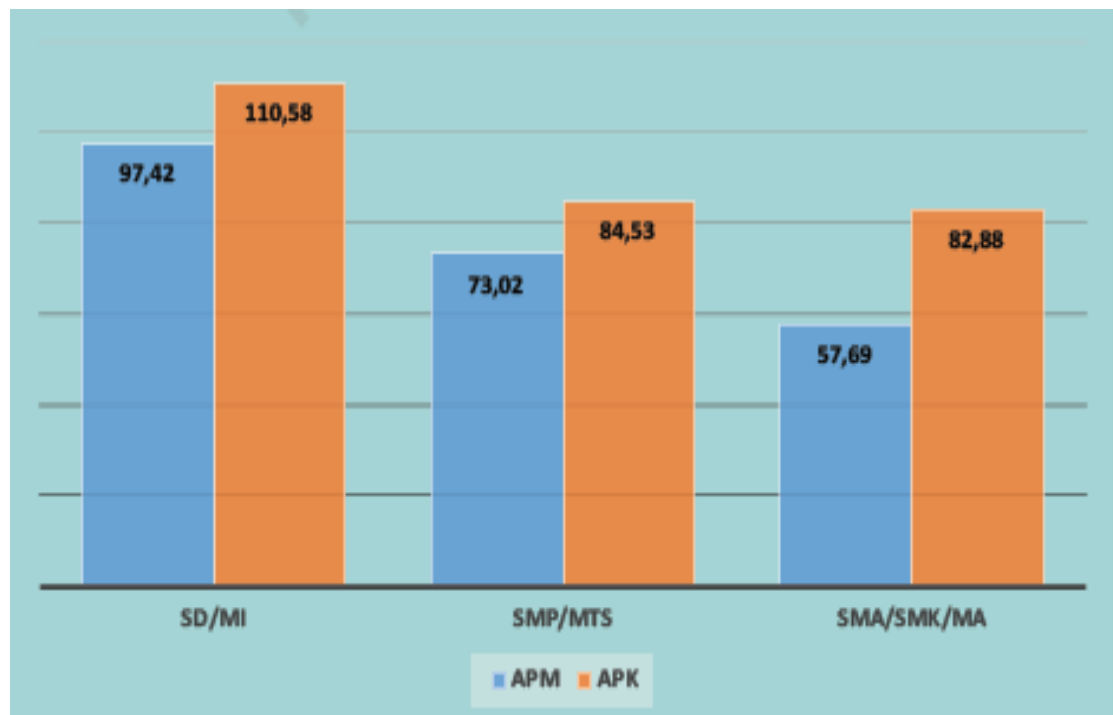
Pendidikan merupakan proses pemberdayaan sumber daya manusia dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu bangsa dan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga mempunyai pengaruh besar terhadap kemajuan suatu daerah. Indikator makro yang sangat mendasar dari sektor pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan ini diterjemahkan dalam bentuk indikator tunggal yang disebut angka melek huruf. Seseorang dikatakan melek huruf apabila ia memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin atau lainnya.

Terkait dengan hal tersebut angka melek huruf penduduk usia 15 Tahun ke atas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 97,79%. Artinya, 97,79% dari jumlah penduduk usia 15 Tahun ke atas telah mampu baca tulis secara baik. Keberhasilan upaya peningkatan pendidikan dapat juga diukur dengan cara melihat kemampuan untuk meningkatkan jumlah mereka yang mengenyam pendidikan. Indikator yang biasa digunakan dalam pengukuran tersebut antara lain adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan

indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Pada Tahun 2017 angka APK dan APM untuk SD/MI (7-12 Tahun) masing-masingnya adalah 110,56% dan 97,42%. Selanjutnya APK dan APM untuk SMP/MTs masing-masingnya 84,53 % dan 73,02%.

Indonesia telah menetapkan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun: enam Tahun di sekolah dasar (anak usia 7–12 Tahun) dan tiga Tahun di SLTP (anak usia 13–15 Tahun). Artinya seluruh penduduk usia 7–15 Tahun diwajibkan berada pada jenjang pendidikan. Dengan demikian, berdasarkan APM SD/MI dan SMP/MTs di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang secara keseluruhan belum mencapai/mendekati angka 100 persen, menunjukkan belum berhasilnya pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar di daerah ini. Selanjutnya jika dilihat pada jenjang yang lebih tinggi (SM/MA), APK dan APM SM/MA masing-masingnya adalah 82,88% dan 57,69%. Dari sisi APM terlihat bahwa kurang separuh dari penduduk yang seharusnya berada pada jenjang pendidikan SM/MA yang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut.

Bagi kepentingan pembangunan yang berkelanjutan, kebutuhan tenaga tenaga kerja yang berpendidikan yang lebih tinggi (SM/MA ke atas) dirasakan mendesak. Oleh karenanya, dengan kondisi yang ada ini, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mengalami kendala yang mendasar dalam pelaksanaan pembangunannya. Di sisi lain, dengan kualitas pendidikan penduduk yang rendah, akan menyebabkan juga rendahnya daya saing tenaga kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pasar kerja baik pasar kerja di daerah ini sendiri maupun pasar kerja di luar daerah. Untuk lebih lanjut terkait APM dan APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Survei Sosial Nasional, 2017

Gambar. Perbandingan APM dan APK Berdasarkan Jenjang Sekolah

Terkait dengan kepentingan pasar kerja ini dapat dikemukakan bahwa pendidikan kejuruan belum terlalu menempati posisi yang signifikan sebagai pilihan dalam melanjutkan pendidikan bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari total SMA 67 Sekolah, SMK 54 Sekolah dan MA 26 Sekolah yang ada pada tahun 2017 sehingga total keseluruhan ada 147 SMA/SMK/MA. Dari total keseluruhan tersebut jumlah SMK yang signifikan bagi siswa untuk melanjutkan pada tingkatan sekolah menengah hanya terdapat 54 SMK dari jumlah siswa sekolah menengah pada tahun 2017 yaitu sebanyak 54.347 siswa, jumlah siswa SMK hanya sebanyak 23.958 siswa atau 44,1%.

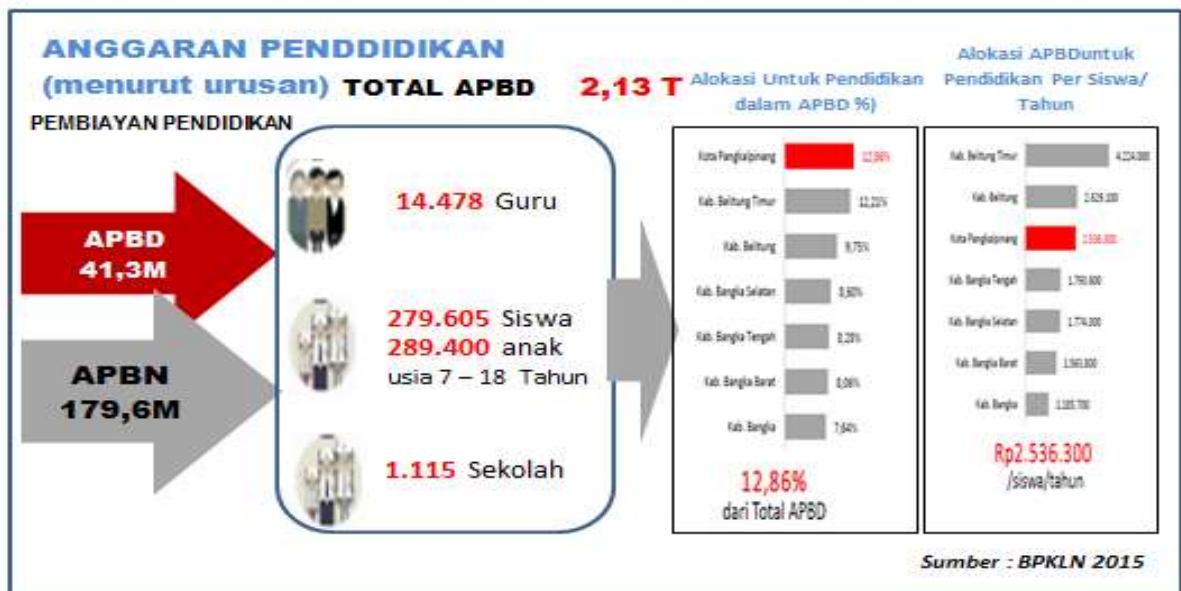
Selanjutnya, membandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, kondisi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif kurang memadai, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2017 berada pada peringkat 7 dari 10 provinsi wilayah Pulau Sumatera. Ini menunjukkan bahwa percepatan peningkatan

kualitas penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tertinggal dibandingkan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Berdasarkan kabupaten/kota, dengan menggunakan indikator persentase melek huruf, APM/APK SD/MI, APM/APK SMP/MTs dan APK/APM SM/MA dan dengan mengakumulasikan peringkat pada masing-masing indikator, terlihat bahwa penduduk Kota Pangkalpinang memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik dibandingkan daerah lainnya. Di tempat kedua adalah Kabupaten Bangka diikuti oleh Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Selatan.

B. Peta Mutu Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dalam mengetahui mutu pendidikan, perlu adanya pengetahuan awal tentang anggaran pendidikan itu sendiri. Berdasarkan data BPKLN tahun 2015 alokasi dana pendidikan di Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam APBD yaitu dapat dilihat pada gambar berikut ini.

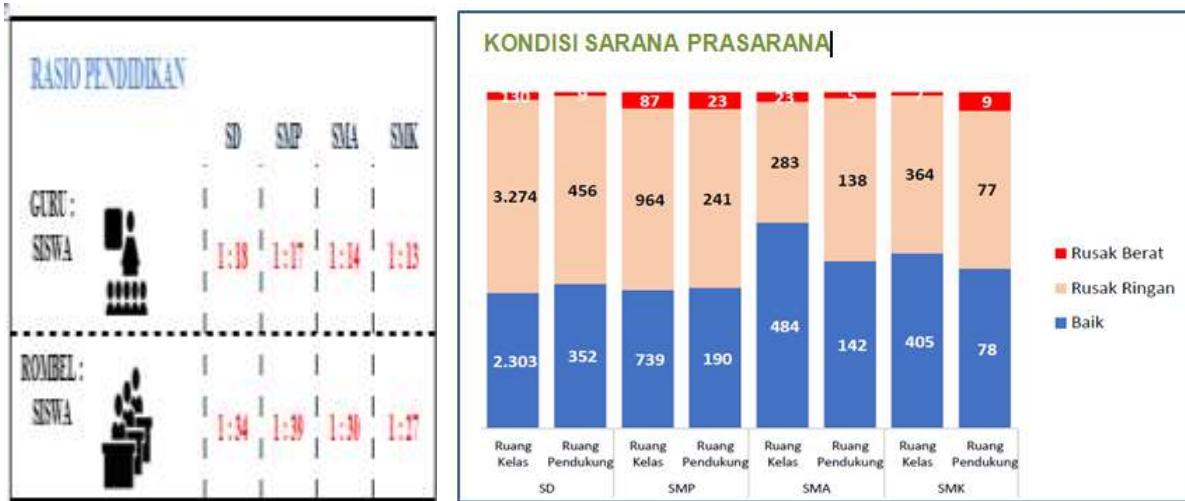


Kemudian indeks pembangunan manusia Bangka Belitung berada pada urutan ke 16 dari 34 Provinsi di Indonesia. Hal ini perlu ada penguatan lebih

lanjut untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Hal ini sesuai dengan data dari BPS Tahun 2015 yaitu



Kemudian terkait rasio pendidikan dan kondisi sarana prasarana menurut data PDSPK Tahun 2015 yaitu



Rasio ini menunjukkan bahwa antara jumlah guru dan siswa serta jumlah rombel dengan siswa masih dalam kategori ideal namun perlu peningkatan secara optimal untuk memaksimalkan kualitas pendidikan itu sendiri. Kondisi sarana prasarana perlu adaya perbaikan lebih lanjut karena secara jumlah kondisi cenderung rusak ringan sehingga perlu adanya kebijakan untuk memperbaiki kondisi tersebut secara komprehensif.

Kemudian hasil UKG Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Secara Nasional hasil rata-rata UKG di Provinsi Kep. Bangka Belitung berada pada peringkat 6 dari 34 Provinsi. Hal ini menunjukkan sesuatu yang baik dari segi kualitas guru di wilayah lainnya.

Berkenaan dengan rata-rata hasil Ujian Nasional dan integritas hasil ujian nasional menunjukan hal baik juga, hal ini dapat dilihat berdasarkan data Puspendik Tahun 2016 berikut ini.



Selain itu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terkait jumlah sekolah yang terakreditasi menunjukan hal yang baik. Hal ini sesuai dengan data UPMP berikut ini.



III. PENUTUP

Kebijakan populis bidang pendidikan, yaitu perlu adanya analisis kebutuhan tenaga tenaga kerja yang berpendidikan lebih tinggi (SM/MA ke atas) yang dirasakan mendesak. Di sisi lain, dengan kualitas pendidikan penduduk yang rendah, akan menyebabkan juga rendahnya daya saing tenaga kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pasar kerja baik pasar kerja di daerah ini sendiri maupun pasar kerja di luar daerah.

Terkait Peta Mutu pendidikan di Provinsi Kep. Bangka Belitung bahwa Penguatan SDM untuk dapat mengawal implementasi PMP masih sangat dibutuhkan, terutama untuk pengembangan kemampuan fasilitator daerah untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran. Mengembangkan pedoman PMP yang lebih sederhana dan lebih mudah dibaca terutama untuk memudahkan sekolah

menjalankan PMP. Kapasitas LPMP dalam melaksanakan program penjaminan mutu pendidikan perlu terus ditingkatkan baik dari sisi kapasitas lembaga maupun kualitas SDM. Kemampuan LPMP melakukan analisis data mutu pendidikan dalam rangka memberikan masukan kepada pemerintah daerah perlu dipertajam. Sebagai penyelenggara pendidikan dasar dan menengah, pemerintah daerah (kabupaten/kota dan provinsi) harus memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran pengimbasan perlu dipastikan. Perlu dikembangkan metode pengumpulan data mutu pendidikan terutama untuk meningkatkan kualitas data dan meningkatkan kesadaran agar secara rutin memasukkan data mutu sekolah. Pemetaan mutu pendidikan harus dijaga kontinuitasnya sehingga dapat dipelajari perubahan mutu sekolah dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Aneta, Asna, '*Jurnal Administrasi Publik*', Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo, vol. 1, no. 1 (2010), pp. 54-65.
- George III. Edwards, *Implementing Public Policy*, Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Graha N. Andi, '*Jurnal Ekonomi Modernisasi*', Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi, vol. 5, no. 2 (2009), pp. 117-126.
- Gunawan, Sumodiningrat, *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.
- Hatu A. Rauf, '*Jurnal Inovasi*', Pemberdayaan dan Pendampingan Sosial dalam Masyarakat', vol. 7, no. 4 (2010) pp 240-254.
- Husna, Nurul, '*Jurnal Al-Bayan*', Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, vol. 20, no. 29 (2014), pp. 45-58.
- Ismanto, Ricky, *Pengantar Kebijakan Publik*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- Putera E. Roni, '*Jurnal Demokrasi*', Analisis terhadap Program-program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia, vol. 6, no. 1 (2007), pp. 37-61.
- Riant D. Nugroho, *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006.
- Said A. Zainal, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004.
- Sitepu, Anwar, '*Jurnal Sosio Informa*', Analisis Efektifitas Kelompok Usaha Bersama Sebagai Instrumen Program Penanganan Fakir Miskin, vol. 2, no. 1 (2016), pp. 53-68.

Suharto, Edi, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Peran Pembangunan Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Sejahtera*, Bandung: Alfabeta, 2007.

Sutikno et al, '*Jurnal Ekonomi Pembangunan*', Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Sistem, vol. 11, no. 1 (2010) pp. 135-148.

Tampubolon, Joyakin et al, '*Jurnal Penyuluhan*', Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendekatan Kelompok, vol. 2, no. 2 (2006), pp. 10-22.

Yeremias T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*, Yogyakarta: Gava Media, 2004.